

STRATEGI MODERNISASI MILITER INDONESIA DALAM PENYEIMBANGAN KEKUATAN MILITER DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA TAHUN 2008-2014

Oleh :

Nanda Iskandar

Email : niskandar51@yahoo.com

Pembimbing : Pazli, S.IP, M.Si

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
– Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

This study identifies Indonesian military modernization strategy in balancing military power with countries in Southeast Asia 2008-2014. The need for the Indonesian military modernization is inseparable from some reason. The change due to the threat of global development, the increase in the defense budget in the countries of Southeast Asia which borders with Indonesia, the need to add and rejuvenation Indonesian defense equipment which can be categorized not feasible. The main objective of the modernization of Indonesia as security stability in the country and the effects desist threats coming from outside. For that framework built Minimum Essential Force (MEF) which is an ideal posture in terms of resources and defense equipment that must be owned by Indonesia.

Keywords: : *Modernization of the Indonesian military, The Minimum Essential Force (MEF)*

Latar Belakang

Pergeseran paradigma keamanan yang mengedepankan sifat-sifat baru ancaman dengan sendirinya mengakibatkan perubahan respon terhadap suatu ancaman. Ketika paradigma keamanan masih memiliki persepsi bahwa yang dimaksud ancaman terhadap keamanan nasional selalu berbentuk ancaman militer, maka tanggapan terhadap suatu ancaman selalu berupa respon-respon militer pula.

Seiring dengan pergeseran sifat ancaman sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka respon yang diberikan juga tidak akan selalu berupa respon militer. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan militer dan nonmiliter untuk merespon setiap kemungkinan ancaman yang dihadapi.

Geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australian serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menyebabkan kondisi nasional sangat dipengaruhi

oleh perkembangan konteks strategis. Indonesia sebagai salah satu Negara kunci dalam stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara harus senantiasa melakukan optimalisasi terhadap diplomasi pertahanan yang dilaksanakan agar selaras dengan ancaman dan tantangan yang berkembang. Indonesia juga memprediksi ancaman yang akan dihadapi lima belas tahun ke depan. Pada lingkup global antara lain masalah isu terorisme, isu kelangkaan energi, isu krisis pangan dan air, isu pemanasan global, *cyber crime*, isu pandemik, dampak krisis ekonomi global, serta isu pencemaran lingkungan.

Pada lingkup regional antara lain isu konflik perbatasan dan berbagai kejahatan lintas batas seperti penyelundupan senjata, penyelundupan manusia, pencurian kekayaan alam di darat maupun di laut, dan perompakan di laut. Sementara pada lingkup nasional, antara lain isu perbatasan dan pulau-pulau terluar, isu terorisme, isu separatis, isu radikalisme, serta keamanan maritim dan dirgantara.

Berdasarkan kesadaran bahwa keamanan adalah kepentingan semua pihak dan ancaman selalu bersifat multidimensional, maka konsep keamanan komprehensif berupaya menciptakan stabilitas keamanan secara damai melalui keterpaduan komprehensif semua upaya di segala aspek kehidupan.

Indonesia menempatkan isu-isu seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi informasi ke dalam lingkup pertahanan negara. Isu-isu tersebut dalam skala tertentu dapat berkembang menjadi isu-isu

pertahanan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan, dan kehormatan bangsa. Atas dasar itu, konsepsi pertahanan Indonesia dikembangkan untuk memberdayakan fungsi-fungsi militer dalam mewujudkan kondisi dalam negeri yang stabil yang memberikan efek tangkal terhadap setiap kemungkinan ancaman.

Negara di kawasan regional Asia tenggara pada tahun 2008 telah meningkatkan anggaran pertahanan melebihi 1% hingga 6%. Negara-negara di kawasan asia tenggara seperti singapura anggaran pertahanan mencapai 7,6 % dari PDB, Malaysia memiliki anggaran pertahanan 2,2%, Thailand memiliki anggaran pertahanan 1,9%. Filipina memiliki anggaran pertahanan 1,1%. Kebijakan pertahanan dan alutsista sangat memerlukan dukungan anggaran yang rasional. Dengan alokasi anggaran kurang dari 1 % PDB sangat sulit untuk membangun kekuatan pertahanan yang memadai.

Isu keamanan regional yang masih mengemuka adalah konflik antarnegara yang berkaitan dengan klaim teritorial perebutan pulau-pulau kecil terluar sangat vital dalam penentuan batas wilayah termasuk juga yang dialami Indonesia. Pulau-pulau tersebut berfungsi sebagai titik pangkal penarikan batas wilayah NKRI dan menjadi isu pertahanan yang serius dalam konteks kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Untuk menindak lanjuti konflik teritorial dan menjaga wilayah perbatasan Indonesia baik darat maupun laut yang langsung berbatasan dengan Negara-negara

seperti Timor Leste, Papua Nugini, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Australia, Indonesia meningkatkan anggaran dalam perbelanjaan alutsista dan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan personil.

Kondisi alutsista TNI yang saat ini rata-rata usia pakainya sudah tua (25 sampai dengan 40 tahun) berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional dan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Kondisi TNI baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana termasuk Alutsista masih jauh untuk menjadi postur pertahanan negara dalam kebutuhan MEF dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk.

Tantangan pertahanan pada tahun-tahun yang akan datang diperkirakan akan lebih kompleks. Wilayah Indonesia yang sangat luas, yakni sekitar 8 juta kilometer persegi, serta karakteristik geografi sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau dengan wilayah maritim yang luasnya hampir 6 juta kilometer persegi membutuhkan alokasi anggaran pertahanan yang proporsional dengan tingkat risiko yang dihadapi. Dengan alokasi anggaran pertahanan di bawah 1% dari PDB menjadi tantangan yang tidak mudah dalam penyelenggaraan pertahanan dalam mengawal NKRI.

Untuk menghadapi tantangan tugas pertahanan tersebut, pembangunan pertahanan diprioritaskan pada pembangunan kekuatan dan peningkatan profesionalisme prajurit dengan ketersediaan Alutsista yang mampu mendukung kesiapan siaga dan mobilitas dalam konteks tersebut,

Kekuatan Pokok Minimum mendesak realisasinya. Untuk mewujudkan Kekuatan Pokok Minimum tersebut, proyeksi anggaran pertahanan dalam dua sampai tiga tahun yang akan datang diharapkan dapat berada di atas 1% dari GDP dan meningkat secara bertahap dalam 10 tahun yang akan datang.

Berdasarkan kesadaran bahwa keamanan adalah kepentingan semua pihak dan ancaman selalu bersifat multidimensional, maka konsep keamanan komprehensif berupaya menciptakan stabilitas keamanan secara damai melalui keterpaduan komprehensif semua upaya di segala aspek kehidupan.

Pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia tidak lepas dari berbagai alasan dan kebutuhan yang mendesak. Peremajaan alat pertahanan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam keterampilan militer, kemampuan personal dan penguasaan teknologi harus di tingkatkan agar dapat bersaing dengan kekuatan militer regional maupun global.

Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia. Pertama, kemampuan sumber daya baik manusia maupun alutsista yang dimiliki. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan juga memiliki sumber daya manusia dalam bidang pertahanan yang besar diharapkan mampu menjadi modal dalam membangun sebuah kekuatan militer yang besar. Indonesia juga telah memfokuskan peremajaan kekuatan militer dari tiga komponen angkatan darat, laut, dan udara yang

diharapkan mampu menjadikan Indonesia menjadi kekuatan militer yang besar di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif besar dan stabil di Asia Tenggara. Selama ini anggaran pertahanan Indonesia dapat dikatakan kecil di bandingkan dengan PDB. Anggaran pertahanan Indonesia lebih kurang 1% dari PDB inilah alasan kekuatan pertahanan Indonesia jika di bandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara relatif kecil. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi anggaran pertahanan Indonesia diharapkan menjadi 2 % ataupun lebih dari PDB.

Ketiga, peningkatan kemampuan Industri pertahanan dalam negeri. Indonesia memiliki beberapa perusahaan pertahanan dalam negeri seperti PT. PINDAD, PT. Dirgantara Indonesia (DI), PT. PAL, dan beberapa perusahaan lainnya. Perusahaan pertahanan dalam negeri ini telah menghasilkan beberapa alutsista dalam menyokong peralatan pertahanan Indonesia. PT. PINDAD memfokuskan pada senjata dan atribut militer, PT. DI memfokuskan pada pembuatan pesawat dan helikopter militer maupun helikopter angkut dan logistik. PT. PAL memfokuskan pada pembuatan kapal perang dan kapal selam serta pemeliharaan.

Dapat dikatakan faktor-faktor dalam negeri mampu menjadikan dan mendorong Indonesia membangun kemampuan pertahanan yang kuat serta mampu bersaing dengan kekuatan militer di regional serta yang paling utama sekali sebagai daya tangkal terhadap ancaman yang

mengancam stabilitas keamanan Indonesia.

Pembangunan personel TNI dilaksanakan dalam rangka membentuk personel TNI yang profesional. Langkah yang ditempuh adalah peningkatan kuantitas dan kualitas personel TNI secara berkelanjutan melalui rekrutmen (*werving*) militer sukarela dan prajurit karier dari masyarakat yang berpendidikan D-3, S-1, dan S-3, dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan.

Pemantapan kekuatan dan peningkatan profesionalisme personel TNI dilakukan melalui pengembangan kekuatan terpusat, kewilayahan, satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan pendukung, serta pelaksanaan latihan perorangan hingga latihan gabungan TNI.

Saat ini kekuatan personel TNI berjumlah 402.595 prajurit, terdiri dari 298.848 prajurit TNI AD, 62.947 prajurit TNI AL dan 32.194 prajurit TNI AU, serta 8.606 prajurit bertugas di Mabes TNI, departemen Pertahanan dan Departemen /LPND. Indonesia terdiri dari 12 komando daerah militer (KODAM). KODAM terbagi lagi dalam beberapa unit dibawahnya seperti komando resimen militer (KOREM) yang terletak di ibu kota provinsi. Sementara untuk distrik militer (KODIM) terletak di wilayah setingkat kota atau kabupaten. Komando rayon militer (KORAMIL) merupakan unit terkecil yang terletak di kecamatan. Angkatan darat mempunyai 2 komando kusus yakni komando strategi angkatan darat (KOSTRAD) dan komando pasukan kusus (KOPASUS).

Angkatan laut terbagi dalam komando armada barat yang terletak di Jakarta dan armada timur yang terletak di Surabaya. Marinir yang merupakan pasukan khusus dari angkatan laut di sebar dalam beberapa wilayah 3 batalion marinir berada di Surabaya. 3 batalion marinir tang selalu siaga berada di Jakarta. 3 batalion marinir berada di teluk rantai sumatera. Total kekuatan marinir adalah 20.000 ribu personil.

Untuk angkatan udara dibawah komando operasional angkatan udara (KOOPSAU) berada di dua tempat untuk wilayah barat berada di Jakarta dan wilayah timur di Makasar. Untuk pusat perbaikan peralatan berada di beberapa tempat antara lain Jakarta, Bogor, Madiun, Malang, Makasar, Subang, Pekanbaru.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi satu kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN dan memiliki visi yang dinyatakan menjadi kekuatan ekonomi sepuluh besar di dunia pada tahun 2025. Pada tahun 2010 IMF menyatakan bahwa Indonesia akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia berkembang selama dekade berikutnya.

Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengeluaran pertahanan telah meningkat secara signifikan dalam dua tahun terakhir, membuat anggaran pertahanan Indonesia terbesar kedua di antara negara-negara tetangganya. Anggaran pertahanan pada tahun 2010 mengalami kenaikan 27,8% dibanding tahun sebelumnya,

sedangkan anggaran 2011 sebesar \$ 6,5 miliar dollar.

Industri pertahanan adalah industri baik milik negara maupun swasta nasional yang mampu atau berpotensi secara sendiri-sendiri atau berkelompok untuk sebagian dan seluruhnya, menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan serta jasa pemeliharaan guna memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan.

Dalam kurun waktu antara tahun 2010-2014, sejumlah kebutuhan produk pertahanan dapat dikelompokkan dalam produk industri maritim; produk industri dirgantara, produk industri transportasi darat, produk industry senjata strategis, produk industri senjata dan amunisi, produk industri elektronika pertahanan,serta produk industri penunjang dan industri kreatif.

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) seperti PT. DI, PT. PINDAD, PT. PAL dan PT. LEN dilibatkan dan ditingkatkan produktivitasnya dalam menyokong Pembangunan MEF. Ini akan menjadi program yang berkelanjutan menuju terwujudnya Postur Ideal TNI.

Aspek dimensi luar negeri yang bisa faktor pendorong dalam mencapai MEF antara lain kerjasama pertahanan. Sebagai Negara yang memaikan peranan penting di asia tenggara Indonesia selalu aktif menggalang kerjasama dengan Negara tetangga tujuan untuk mebicarakan persoalan yang sifatnya mengancam dan melihat kemampuan pertahanan serta berbagi pengalaman dalam menghadapi masalah ataupun ancaman.

Kerjasama alih teknologi yang dilakukan Indonesia dengan beberapa Negara dalam bidang pertahanan bertujuan untuk kemandirian dalam memproduksi serta memperbaiki alutsista yang dimiliki. Tujuan lainnya adalah penghematan anggaran dalam membangun kekuatan pertahanan.

Pinjaman luar negeri merupakan sebuah alternative dalam memenuhi anggaran pertahanan mengingat masih banyak pos-pos lain yang membutuhkan dana APBN yang lebih diutamakan. Pinjaman luar negeri dapat di jadikan pilihan dalam menutupi kebutuhan dana yang mendesak.

Keseriusan pemerintah dalam Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI di buktikan dengan adanya peraturan yang menguatkan pembangunan pokok minimum secara nyata. Dimulai dengan Perumusan *Strategic Defence Review* tahun 2009 untuk menggambarkan ancaman terhadap Negara Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2010 mengenai Rencana strategis (Renstra) 2010-2014. Peraturan ini berisi tentang pemenuhan alutsista yang mendesak dalam jangka waktu lima tahun antara tahun 2010-2014. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama. Dalam peraturan ini dijelaskan pendanaan terhadap kebutuhan yang harus dipenuhi. Penguatan industry pertahanan dalam negeri yang diselaraskan dengan pembangunan kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum TNI.